

**ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh :
Mei Sari
NPM : 1651010076**

Jurusan : Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**ANALISIS PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh :
Mei Sari
NPM : 1651010076**

Jurusan : Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : Dr. Moh Bahrudin, M.A
Pembimbing II : Gustika Nurmala, S.E.I M.Ek**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020**

ABSTRAK

Pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak obyek wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Melihat kenyataan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Pariwisata berperan serta dalam mengelola dan memasarkan obyek-obyek pariwisata serta memberikan keleluasan dan tanggung jawab kepada Dinas yang khusus menangani dan mengawasi masalah-masalah mengenai kepariwisataan yang berada di Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan semboyan Pesisir Barat “Negeri Para Sai Batin dan Para ulama” yang menerapkan nilai-nilai Islam dan berpegang teguh terhadap aturan islam.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ada tiga yaitu Bagaimana upaya dinas pariwisata dalam mengembangkan pariwisata halal di kabupaten Pesisir Barat, Bagaimana peran pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat, dan Bagaimana peran pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Kabupaten Pesisir Barat, dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu analisis data melalui pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara. pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Hasil dari penelitian ini Pengembangan pariwisata halal di kabupaten Pesisir Barat dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata halal di Kabupaten Pesisir Barat oleh dinas pariwisata menggunakan jenis pengembangan pariwisata yang bersifat Pariwisata tipe terbuka, dimana tipe ini yang melibatkan masyarakat sekitar secara langsung dan mempunyai sifat spontan pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitar serta melalui program memperbaiki sarana dan prasarana. Pariwisata halal di Pesisir Barat memang belum mampu memberikan kontribusi yang besar dan dampak signifikan bagi perekonomian daerah karna belum tercantumnya pariwisata halal dalam peraturan daerah serta belum terjalin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan Pesisir Barat sebagai pariwisata halal. Meskipun demikian pariwisata tetap memberikan retribusi pendapatan bagi daerah meskipun tidak terbilang besar nominal pendapatan retribusi dalam waktu pertahunnya.

Keyword : Pariwisata Halal, Pengembangan Pariwisata, Perekonomian Daerah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131,
Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Dalam
Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada
Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)."

Nama : Mei Sari
NPM : 165101076
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Moh. Bahtul An. M. A.

Gustika Nurmalia, S.E.I., M. Ek.

NIP. 195806141989031003

NIP. -

Mengetahui
Ket. Prodi

Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp.
(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat).” disusun oleh Mei Sari, NPM. 1651010076 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Budimansyah, M.kom.I

Sekretaris : Okta Supriyaningsih, S.E., M.Ak

Penguji I : Any Eliza, S.E, M.Ak

Penguji II : Gusti Nurmalia, S.E.I, M.Ek

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198 008012003121001

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah untuk dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjuruyadan makanlah sebagian dari Rezeki-Nya dan hanya kepadanya kamu (kembali setelah) di bangkitkan,” (QS. AL-Mulk: 15)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an dan Terjemahan,(Jakarta, : Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 563

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini kepada :

1. Ketiga orang tua ku tercinta Ayahku Suhaimi (alm) laki-laki terhebat yang belum sempat melihat ica kecilnya mendapatkan gelar S.E karya ini penulis persembahkan untuknya. Ibuku tercinta Nila wati, wanita tangguh, malaikat penjagaku yang telah bnayak berkorbang untuk penulis mlali doa-doa dan usahanyalah penulis bisa kuliah serta yang terakhir ayah tiriku Munyanto laki-laki hebat yang dikirimkan tuhan yang juga telah banyak berkorna untuk penulis.
2. Adik-adik ku tecinta siska aprillia dan Hinda Yani yang tela banyak memberikan semangat yang terus menerus kepada penulis.

Bandar Lampung, 10 juni 2020

Penulis

Mei Sari

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Mei Sari. Penulis dilahirkan di Way sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 18 mei 1998 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah Suhaimi (alm) dan ibu Nila Wati. Penulis menempuh pendidikan formal:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Sindi, Dari tahun 2004 sampai tahun 2010;
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Karya Penggawa, dari tahun 2010 sampai tahun 2013;
3. Sekolah Menegah Atas (SMA) Islam Ibnu Rusyid Kotabumi, dari tahun 2013 sampai tahun 2014;
4. Madrasah Aliyah (MA) Negeri Krui, dari tahun 2014, sampai tahun 2016;

Tahun 2016, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung melalui jalur undangan.

Bandar Lampung, 10 juni 2020

Penulis

Mei Sari
1651010076

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Sang pemilik dan pemberi cinta,yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)”.

Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak lain yang mendukung penulisan skripsi ini diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.

2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di jurusan Ekonomi Islam dengan baik dan lancar.

3. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I dan Ibu Gustika Nurmalia, S.E., M.Ek selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami.

5. Keluarga seperjuangan kelas Ekonomi Islam A angkatan 2016, atas pertemanan yang kompak, cerita, semangat, dukungan, bersama-sama menajalani suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Proud to be a part of you, tak terkecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap semoga dengan Rahmat dan Izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Juni 2020

Mei Sari
NPM.1651010076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. penegasan judul	1
B. Alasan memilih judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	4
E. Rumusan Masalah	14
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	15
G. Metode Penelitian.....	16

BAB II : Kajian Teori

A. Pariwisata	22
1. Pengertian Pariwisata	22
2. jenis-jenis pariwisata.....	25
3. Pengembangan Pariwisata	27
4. Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian	31
B. Pariwisata halal.....	34
1. Pengertian Pariwisata Halal	34
2. konsep pariwisata Halal	36
3. Manfaat Pariwisata Halal	39
4. Pariwisata halal Perspektif Ekonomi Islam	40
5. Pariwisata Halal Perspektif UU RI NO.33	45
6. Pariwisata Halal Perspektif Fatwa DSN-MUI	46
C. Perekonomian Daerah	48
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	48
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	50
D. Kajian Pustaka.....	51
E. Kerangka Pikir	55

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
1. Sejarah Kabupaten Pesisir Barat	57
2. Kondisi Geografi dan Iklim	61
3. Kependudukan	63
B. Deskripsi Data Penelitian	65
1. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat	65
2. Potensi Wisata Kabupaten Pesisir Barat	66
3. Wisata Religi	75
C. Pengembangan Dan Pengelolaan Pariwisata Halal Di Kabupaten Pesisir Barat.....	78
D. Retribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dari Sektor Pariwisata Halal	80
E. Solusi Pengembangan Pariwisata Halal Oleh Dinas Pariwisata Pesisir Barat.....	82
F. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	83

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pengembangan Pariwisata Halal oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	86
B. Kendala Pengembangan Pariwisata Halal Kabupaten Pesisir Barat ...	94
C. Peran Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Kabupaten Pesisir Barat	96
D. Peran Pariwisata Halal dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam	100

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	103
B. SARAN	105

DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 1. Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018.....	11
Tabel 2. Luas wilayah kecamatan Pesisir Barat	62
Tabel 3. Jumlah 17 kategori Produ Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku.....	66
Tabel 4. Potensi wisata Kabupaten Pesisir Barat	67
Tabel 5. Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2019	81
Tabel 6. Retribusi pendapatan wisata yang dikelola pemerintah daerah	82
 Gambar	
Gambar 1. Mancanegara dan Domestik yang berkunjung dan menginap di hotel Provinsi Lampung	7
Gambar 2. Persebaran penduduk Pesisir Barat 2016	64
Gambar 3. Kepadatan penduduk Pesisir Barat menurut Kecamatan	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Sk seminar Proposal
- Lampiran 2. Sk pembimbing
- Lampiran 3. Surat perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 4. Surat Pra Riset
- Lampiran 5. Surat Riset
- Lampiran 6. Data Kunjungan Wisatawan
- Lampiran 7. Realisasi Retribusi
- Lampiran 6. Kerangka Wawancara
- Lampiran 7. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul dan menghindari perbedaan persepsi terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu akan dikemukakan penegasan judul terhadap pokok permasalahan. **“ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM”** (Studi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu ntuk memperoleh pengertian tepat dan arti pemahaman ari keseluruhan.¹

3. Pengembangan

Pengembangan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur serta menjurus ke sasaran yang dikendaki. Pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan berkualitas, seimbang dan bertahap.²

¹ Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 65.

² I Made Suniastha Amerta, *Pengembangan Pariwisata Alternatif*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka 2019), h. 13-14.

4. Pariwisata

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dalam lingkungan hidup dengan dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.³

5. Halal

Kata halal memiliki arti “ yang diperbolehkan” berdasarkan ajaran islam (syarii). Halal merupakan salah satu dari lima perbuatan yang berhubungan dengan moral manusia, selain fardu (utama), mustahab (dianjurkan), makruh (tidak disukai) dn haram (dilarang). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kata halal meruakan segala perbuatan yang diizinkan menurut ajaran islam.⁴

6. Perspektif

Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang sesuatu hal.⁵

7. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumberdaya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.⁶

³ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prosepeknya*, (Yogyakarta: Kansius, 2001), h. 21.

⁴ Bachrudin Shaleh Luturlean, *Strategi Bisnis Pariwisata*, (Bandung: Humaniora, 2019), cet.1, h. 146-147

⁵ Yusuf Qhardawi, *Fiqh Zakah Muarsasat Ar-risalah* (Bairut Libanan, Cet II 1408H/1998 terjemahan Didin Hafifudin), h. 1.

⁶ *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),, h.19.

Berdasarkan penjelasan dan penegasan bagian- bagian penting diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Analisis prospek Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan alasan subjektif adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Peneliti tertarik dengan permasalahan ini karna banyaknya wisata pantai di kabupaten pesisir barat yang bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah namun kurangnya cara pemerintah daerah mengembangkan wisata- wisata pantai yang ada contoh yang paling tren saat ini adalah pariwisata berbasis syariah (halal). Dan pada tanggal 15 maret 2018 wakil Bupati pesisir barat, Sp.MH meyampaikan di seminar pariwisata yang mengambil tema “ konsep pembangunan pariwisata halal. Dan akan menyiapkan legulasi tim yang akan menjadikan pariwisata pesisir barat menjadi pariwisata halal dan akan menyiapkan tim dalam hal tersebut.

2. Alasan subjektif

Penelitian ini sesuai dengan disiplin keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sebuah sektor yang telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Kemajuan dan kesejahteraan yang semakin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya di kawasan-kawasan negara lain. Sehingga secara tidak langsung, pergerakan manusia akan berpengaruh terhadap mata rantai ekonomi yang saling berkesinambungan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal. Dunia pariwisata selalu mengalami peningkatan dan memunculkan sesuatu yang baru dalam perkembangannya.

Perkembangan pariwisata secara berkelanjutan menjadi prioritas pemerintah yang membawa perkembangan yang sangat cepat. Potensi wisata yang beraneka ragam yang tersebar disetiap daerah tujuan pariwisata dilestarikan dan dikembangkan, karena dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi pelestarian budaya, perekonomian, peningkatan pendidikan dan agama. Sela itu jga perkembangan destinasi pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah.⁷

Lampung salah satu provinsi di indonesia yang memiliki potensi alam dan budaya yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata. Potensi tersebut antara lain keindahan alam dan relief pegunungan dan hamparan pantai yang indah. Selain itu dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadat daya tarik wisatawan di daerah ini. Berbagai jenis pariwisata telah dikembangkan dengan baik.

Tahun 2009 pemerintah provinsi Lampung mencanangkan kunjungan wisata, jenis wisata yang dapat dikunjungi dilampung adalah wisata budaya di beberapa kampung tua di Sukau, Liwa, Kembahang, Batu Brak, Kenali, Ranau dan Krui.⁸ Tahun 2014 dinas pariwisata lampung sudah menentukan tujuh wisata unggulan yang terdapat dilampung yakni, Krakatau, Bandar Lampung (Teluk Betung, Tanjung Karang), Kiluan (laut yang terdapat banyak ikan lumba-lumba di kabupaten Tanggamus), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, taman wisata way kambas,tanjung setia, dan menara siger.

⁷ Muani, *Kebudayaan dan Pariwisata* (Yogyakarta : Garudhawaca, 2018), h. 2.

⁸ D. Surya, *Provinsi di Indonesia*, (CreateSpace Independent Publishing Platferm, 2012), h. 388.

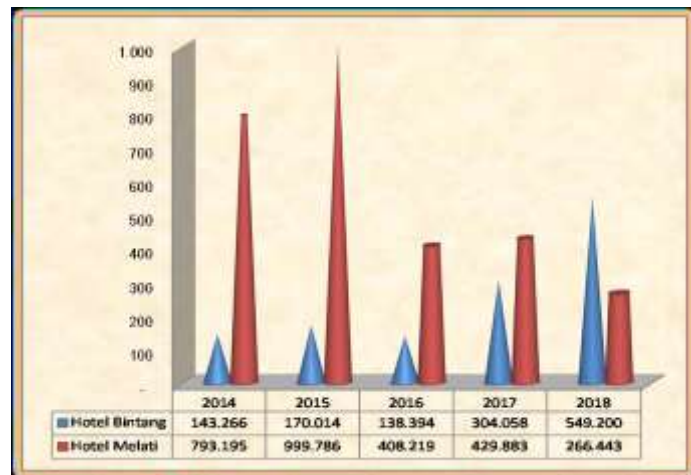
Pengembangan wisata unggulan ini sudah dikemas dengan baik dan menjadi tujuan wisatawan.⁹ Produktivitas diantaranya bisa dilihat dari jumlah tamu yang berkunjung dan menginap di hotel/akomodasi lainnya disuatu daerah dari data jumlah tamu yang berkunjung yang bertamu dan menginap di hotel dan akomodasi lainnya yang ada di provinsi lampung, sepanjang 5 tahun terakhir terlihat peningkatan khususnya di hotel berbintang jumlah kunjungan dan perilaku tersebut tentunya akan memicu produktivitas atau nilai tambah yang dihasilkan daerah ini pada sektor pariwisata dan berdampak pada kegiatan sektor ekonomi lainnya seperti sektor perhotelan.¹⁰

Keberhasilan yang paling mudah untuk diamati adalah bertambahnya jumlah kedatangan wisatawan dari periode ke periode. Pertambahan wisatawan dapat terwujud jika wisatawan yang telah berkunjung puas dengan destinasi dengan berbagai atribut yang ditawarkan oleh pengelola. Wisatawan yang puas akan cenderung menjadi loyal dan mengulang liburannya dimasa mendatang dan memungkinkan mereka merekomendasikan kepada teman-teman dan kerabatnya untuk berlibur ketempat yang sama.¹¹

⁹ Mentari Rendayani, *Analysis Potential and Strategy Development of Puncak Mas Sukadanaham bandar lampung, Skripsi*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia), 2018, h. 10.

¹⁰Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung” (Online), tersedia di: <https://lampung.bps.go.id/> (21 Desember 2019).

¹¹ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2017), h. 6-7 .



Sumber : BPS provinsi Lampung

Gambar 1
Mancanegara dan Domestik yang Berkunjung dan menginap dihotel provinsi lampung 2014-2018

Pariwisata syariah merupakan suatu tren baru dalam dunia pariwisata saat ini. Indonesia telah dikenal luas di dunia sebagai pariwisata halal terbaik di dunia atas kemenangannya dalam event “*The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015*”. Indonesia berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, meliputi; *World Best Family Friendly Hotel*, *World Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Tourism Destination*. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar yang memudahkan negara Indonesia untuk terus melakukan pengembangan pariwisata syariah dan industri jasa syariah, sehingga Indonesia dapat menanamkan bahwa pariwisata syariah identik dengan Negara Indonesia di dalam *mindset* pariwisata dunia.

Pengembangan wisata syariah bukanlah wisata eksklusif karna wisatawan non muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. Wisata syariah bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran, dan

hotel yang menyediakan makanan yang halal dan tempat sholat. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama seperti pariwisata umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Sementara konsep syariah sendiri telah dibekukan lewat fatwa dan persetujuan MUI, kearifan local memberikan cita rasa unik yang melekat pada daerah tujuan wisata. Keterlekatan dengan lokasi ini pada gilirannya akan memberikan ruang pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat setempat.¹²

Peluang dari pengembangan pariwisata halal yaitu potensi pasar baik domestik (penduduk Indonesia 90% beragama Islam) maupun mancanegara (khusus Timur Tengah dan Malaysia cukup menjanjikan). Potensi yang menjanjikan terhadap pengembangan pariwisata Islami atau pariwisata syariah di Indonesia semakin diperkuat dengan *launching* pariwisata syari'ah pada tanggal 30 Oktober 2013 pada acara Indonesia Halal Expo (INDEX) di Jakarta *Internasional Expo* yang didukung oleh Kemenparekraf dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pengembangan kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan bagaimana wisatawan membelanjakan uang sebanyak- banyaknya selama melakukan wisata. Makin lama wisatawan berada di suatu tempat wisata akan meningkatkan pengeluaran mereka, sehingga akan membangkitkan perusahaan jasa transportasi, hiburan, akomodasi, dan jasa lainnya. Pengembangan

¹²Sudirman Suparmin, *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatra Utara*, Tansiq, Vol. 1, No. 2, 2018. H. 192-193

kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. Pengembangan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Oleh karena itu pengelolaan dan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-masing daerah. Begitu juga halnya dengan Provinsi Lampung yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat (Lambar) sangat kaya dengan potensi alam, budaya dan pariwisata. Wisata bahari menjadi sektor unggulan, karena Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak pantai dengan jenis ombak yang berkualitas internasional sehingga sering dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang suka berselancar.¹³ selain wisata bahari, adapun objek wisata lainnya seperti wisata religi/budaya, ekowisata dan eventwisata. Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pariwisata bahari yang besar di Provinsi Lampung dengan panjang pantainya 210 km. Kabupaten Pesisir Barat mempunyai 51 objek wisata potensial baik sektor bahari, religi/budaya, ekowisata dan eventwisata yang tersebar di seluruh wilayah mulai dari Lemong, di bagian utara Kabupaten Pesisir Barat, hingga kawasan perbatasan bagian selatan yaitu

¹³ Husni Yusuf, *Pemetaan Objek Wisata Alam Kabupaten Pesisir Barat*, Tahun 2015, September 2019), h. 2

Bengkunat Belimbing yang saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Jumlah Objek Wisata Alam di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 51 objekwisata terdiri dari 12 objek wisata bahari, 2 objek ekowisata dan 3 pemandangan alam dan 1 agroforestry. Persebaran Objek Wisata di Kabupaten Pesisir Barat terbagi dalam 3 area. Area Pesisir bagian Tengah memiliki objek paling banyak yaitu terdapat 9 objek wisata alam. Sedangkan Area Pesisir Barat bagian Selatan memiliki objek wisata paling sedikit yaitu terdapat 3 objek wisata alam. Adapun Area Pesisir Barat bagian Utara terdapat 6 objek wisata alam. Area Pesisir Barat bagian Utara terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa dan Pulau Pisang. Merupakan area yang menempati bagian Utara Kabupaten Pesisir Barat yang berbatasan langsung Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat 6 objek wisata, yaitu Pantai Way Gegas dan Pugung di Kecamatan Lemong, Pantai Saung dan Kota Karang di Kecamatan Pesisir Utara, Pantai Tembakak di Kecamatan Karya Punggawa, dan Pulau Pisang yang merupakan sebuah kecamatan. Area Pesisir Barat bagian Tengah merupakan wilayah Pusat Pariwisata yang menjadi titik persinggahan awal bagi wisatawan sekaligus Pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. Area ini terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan dan Pesisir Selatan. Terdapat 9 objek wisata, yaitu Bukit Selalaw, Pantai Labuhan Jukung, Way Redak dan Desa Wisata Pahmongan di Kecamatan Pesisir Tengah, Pantai Mandiri di Kecamatan Krui Selatan, Pantai Tanjung Setia,

Karang Nyimboch, Way Jambu, dan Melasti di Kecamatan Pesisir Selatan. Area Pesisir Barat bagian Selatan terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngambur, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing. Terdapat 3 objek wisata, yaitu Penangkaran Penyu Muara Tembulih di Kecamatan Ngambur, Ekowisata Sukaraja Atas dan Resort Pemerihan di Kecamatan Bengkunt Belimbing. Jenis objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat berupa wisata bahari, pemandangan alam, ekowisata dan agroforestry. Area Pesisir Barat bagian Utara terdapat 5 objek wisata bahari yaitu, Pantai Way Gegas, Pugung, Saung, Kota Karang, serta Tembakak dan 1 ekowisata Pulau Pisang.¹⁴

Tabel 1
Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018

No	Kecamatan	Mancanegara	Domestik
1	Lemong	3.414	1.342
2	Pesisir Utara	4.527	1.222
4	Karya Penggawa	3.181	1.944
5	Way Krui	1.736	893
7	Pesisir Tengah	5.439	43.404
8	Krui Selatan	5.556	41.869
9	Pesisir Selatan	3.437	2.333
10	Ngambur	3.622	1.225
11	Ngaras	1.681	858
12	Bangkunt	1.740	809
13	Pulau pisang	3.612	32.439
	TOTAL	37.945	128.338

Sumber : Dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat

¹⁴ *Ibid*, h. 9-10

Menurut data Dinas Pariwisata Pesisir Barat (Pesibar), sampai akhir 2018, kunjungan Wisman (Wisatawan Mancanegara) di Pesisir Barat tembus 37.945 orang sedangkan untuk wisatawan regionalnya berjumlah 128.338. Jumlah ini meningkat tajam, dari tahun sebelumnya kunjungan wisman 2017 hanya mencapai 31.341 orang sedangkan wisata regionalnya 104.456. Untuk tahun 2018, penyumbang terbanyak wisman berasal dari negara, Australia, Spanyol, Amerika Serikat, Selandia Baru, Thailand Dan Jepang.

Apabila dilihat dari sisi pemerintahan, maka pengembangan objek wisata pantai di Pesisir Barat ini, seyogyanya diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal oleh Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian jelas, antara urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Bahwasanya Pemerintah Daerah bewenang untuk mengelola kekayaan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan. Potensi tersebut antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, serta pariwisata. Dalam hal ini, urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yang dapat dilaksanakan sesuai potensi dari Kabupaten Pesisir Barat adalah sektor pariwisata serta semboyan dari kabupaten Pesisir Barat adalah “***Negeri Sai Batin dan Para Ulama***” dimana mayoritas beragama islam dan berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam. Dinas yang memiliki kewenangan

menangani urusan pilihan daerah di Bidang Pariwisata adalah Dinas Pariwisata.¹⁵

Kabupaten Pesisir Barat membutuhkan suatu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan cepat yaitu mengembangkan dari sektor pariwisata karna sebagian besar masyarakat pesisir barat bekerja di sektor pertanian yang masih dikelola secara tradisional dan masih menggunakan teknologi sederhana. Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang cukup dominan yang masih bisa dikembangkan dengan baik karna didukung oleh banyaknya objek dan daya tarik wisata di kabupaten Pesisir Barat yang dapat dikembangkan sampai pada skala nasional bahkan internasional.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganggap penting untuk mengetahui strategi pemerintah terkait analisis pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Pesisir Barat. pengembangan tersebut tidak hanya dilihat melalui kelayakan potensi wisata yang dimiliki, akan tetapi terhadap bagaimana penerapan manajemen atau mekanisme pengelolaan yang ada saat ini dalam upaya mempersiapkan Pesisir Barat sebagai kawasan wisata yang bertaraf nasional yang berbasiskan syariah (pariwisata halal) dalam meningkatkan perekonomian daerah. Seluruh kebijakan pengembangan tersebut seyogyanya diimbangi dengan adanya upaya manajemen secara komprehensif, menyeluruh, dan terpadu serta merupakan konsensus bersama bagi semua komponen pembangunan yang ada.

¹⁵. Wardana, *Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat Skripsi*, (Uversitas Lampung, 2017), h. 24

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai analisis pengembangan pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah perspektif ekonomi islam (studi pada dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya pada latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana upaya dinas pariwisata dalam mengembangkan pariwisata halal di kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana peran pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat?
3. Bagaimana peran pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat perspektif Ekonomi Islam ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian ini.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya dinas pariwisata dalam mengembangkan pariwisata halal di kabupaten pesisir barat.
- b. Untuk mengetahui peran pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat

- c. Untuk mengetahui peran pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat perspektif ekonomi islam

2. Manfaat penelitian

Dari penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan adapun manfaat penelitian adalah :

a. Secara teoritis

Agar dapat tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu ekonomi.

b. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan pengembangan dalam kajian program pengembangan pariwisata berbasis syariah.
2. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada lembaga pemerintahan kabupaten pesisir barat dan masyarakat pesisir barat dalam rangka mengembangkan pariwisata halal di pesisir barat.
3. Mengetahui keadaan sebenarnya pelaksanaan pengembangan pariwisata halal oleh dinas pariwisata Pesisir Barat dalam meningkatkan perekonomian Pesisir Barat.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang pasti (lengkap) dan obyektif serta metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Untuk jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁶ Penelitian *field research* dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan anaisis pengembangan pariwisata halaldalam meningkatkan perekonomian daerah di dinas Priwisata Kabupatn Pesisir Barat.

Selain menggunakan *field Research* peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan imformasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan.¹⁷

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek gejala kebiasaan

¹⁶ Cholid Narbuko Dan Abu Achmad, *metodologi penelitian*, cet 12 (Jakarta : Bumi aksara,2012), h.47.

¹⁷ Hadi Sutrisno, *Metode Research* , (UGM,Yogyakarta 2002), h.142

kemudian di analisis dengan kritis. Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.

Maka dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat patspositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.¹⁸

Adapun analisis data yang dilakukan peneliti yaitu melalui pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara dan catatn akhir penelitian yang menggambarkan lebih lanjut mengenai bagaimanakah upaya yang dilakukan dinas pariwisata Pesisir Barat dalam mengembangkan potensi pariwisata halal terhadap peningkatan perekonomian daerah.

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta CV, 2017), h. 9.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada penelitian yaitu dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dan peneliti terjun langsung ke lokasi-lokasi pariwisata yang ada di Pesisir Barat .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumen, maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.¹⁹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan juga hanya jumlah yang ada di objek/subyek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

¹⁹ Moh Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.64

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yang berjumlah 45 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya, karna keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil untuk populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Selanjutnya teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin diasebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara melihat, mendengar, mengamati dan merasakan hal-hal yang berkaitan dengan model pengembangan pariwisata halal pemerintah daerah

²⁰ Sugiono, *Metodelogi Penelitian*...., h.80-81

dalam meningkatkan perekonomian Pesisir Barat untuk dijadikan sebuah data berdasarkan gagasan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pegawai dinas pariwisata kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan dengan surat kabar, majalah, buku tertulis dari objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data tentang implementasi model pengembangan pariwisata halal pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian Pesisir Barat.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing) : yaitu membenaran apakah data terkumpul melalui pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan untuk diproses atau diolah lebih lanjut. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data akan yang dianalisis berdasarkan rumusan masalah saja.

b. Penemuan hasil : yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Metode Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analisis dimana mendiskripsikan tentang masalah yang ada, kemudian menganalisisnya dan dilalukan sebelum memasuki lapangan. Analisis data ini menjadi salah satu pegangan dalam penelitian. Metode ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan data-data mengenai Analisis pengembangan pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian Pesisir Barat.

Metode *deduktif* adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum dimana digunakan untuk menilai kejadian kasus. metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya dinas pariwisata dan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata halal dalam meningkatkan perekonomian Pesisir Barat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pariwisata

1. Pengertian pariwisata

Istilah pariwisata baru muncul di masyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah Pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (tour), yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sehari-hari sementara dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Komisi Lingga Bangsa-bangsa menyempurkan pengertian tersebut dengan mengelompokkan orang-orang yang dapat disebut wisatawan dan bukan wisatawan. Komisi merumuskan bahwa yang bisa dianggap wisatawan adalah :

- a. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan, dan lain-lain.
- b. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintah diplomasi, agama, olahraga, dan lain-lain.
- c. Mereka yang mengadakan perjalanan dengan tujuan usaha.

- d. Mereka yang datang dalam rangka perjalanan dengan kapal laut walaupun berada disuatu negara kurang dari 24 jam.

Sedangkan, yang tidak bisa dikategorikan sebagai wisatawan adalah:

- e. Mereka yang datang dengan maupun tanpa kontrak kerja, dengan tujuan mencari pekerjaan atau mengadakan kegiatan usaha disuatu negara.
- f. Mereka yang datang untuk mengusahakan tempat tinggal tetap disuatu negara.
- g. Penduduk disuatu tapal batas negara dan mereka bekerja di negara berdekatan.
- h. Wisatawan-wisatawan yang melewati suatu negara tanpa tinggal, walaupun perjalanan tersebut berlangsung lebih dari 24 jam.²¹

Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

Masih banyak definisi lain tentang wisatawan yang dikemukakan oleh para ahli. Kebanyakan mencerminkan sudut pandangan atau kepentingan masing-masing. Beberapa instansi di

²¹ Muljadi A.j, "*Kepariwisata dan perjalanan*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 7-10

indonesia bahkan berpendapat, bahwa yang disebut wisatawan hanya orang-orang asing yang datang ke Indonesia.²²

2. Jenis-jenis Pariwisata

a. Wisata budaya

Jenis wisata ini yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka budaya dan seni mereka, seiring perjalanan serupa ini disatuykan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, drama, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif sejarah dan sebagainya.

b. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air seperti didanau, pantai, teluk atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah dibawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan di daerah-daerah maritim dan jenis ini disebut pula dengan wisata tirta.

c. Wisata Cagar Alam (taman konservasi)

²² James j. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta, Kanisius , 1987), h. 21

Wisata jenis ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengantar wisatawan ke tempat daerah cagar alam, taman lindung hutan, daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh Undang-Undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar dan pecinta alam dalam kaitannya dalam kegemaran memotret binatang atau margasatwa serta pepohonan dan lain sebagainya dan memang mendapat perlindungan dari pemerintah dan masyarakat.

d. Wisata konvensi

Wisata konvensi bisa juga dibilang wisata jenis politik, berbagai negara pada dewasa ini membangun wisata konvensi ini dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan untuk tempat sidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional.

e. Wisata Buru

Jenis wisata ini banyak dilakukan dinegeri-negeri yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini ditur ke dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Negara yang bersangkutan.

f. Wisata ziarah

Jenis wisata ini sedikit banyaknya dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan perorangan atau rombongan ketempat-tempat suci seperti ke makam-makam orang-orang besar atau pemimpin yang diagungkan, kebukit atau gunung yang dinggap keramat dan lain sebagainya.²³

3. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan mengandung pengertian pembangunan secara bertahap dan teratur serta menjurus ke sasaran yang dikendaki. Pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan berkualitas, seimbang dan bertahap.²⁴

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian atau upaya untuk mewujudkan keterpaduan atau kecocokan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam pengembangan sebuah objek wisata dibutuhkan adanya fasilitas yang berfungsi untuk pelengkap dan memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan. Untuk membantu perkembangan pariwisata berdirilah sebuah organisasi yang bertujuan menjaga pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, kemakmuran, perdamaian, kesejahteraan, HAM tanpa membedakan ras, suku, etnis, kelamin, bahasa, agama yaitu

²³ I Gusti Bagus Rai Utama, Pengantar Industri Pariwisata, (Yogyakarta : Deepublish, Agustus 2014), h. 105-111

²⁴ I Made Suniastha Amerta, Pengembangan Pariwisata Alternatif, Surabaya : Scopindo Media Pustaka 2019), h. 13-14.

Organisasi Pariwisata Dunia “*World Tourism Organization (WTO)*”.²⁵ Kemudian, di Indonesia juga pemerintah menata rapi tentang istilah pariwisata dalam UU no.10 tahun 2009 tentang pariwisata yaitu “*berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah*”.

Pengembangan kegiatan pariwisata di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua tipe pengembangan (berdasarkan pola, proses serta pengelolaanya), yaitu tipe tertutup (*enclave*) dan tipe terbuka (*spontaneous*)²⁶ dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pariwisata tipe tertutup, tipe ini memiliki karakteristik lokasinya terpisah dari masyarakat setempat dan tidak melibatkan masyarakat sekitarnya. Sehingga kontribusi untuk daerah sekitar sangat kurang.
- b. Pariwisata tipe terbuka, tipe ini mempunyai sifat spontan pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitar. Sehingga distribusi pendapatan yang diperoleh dari wisatawan dapat secara langsung dinikmati oleh penduduk lokal. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat lokal terhadap pengembangan fasilitas obyek wisata setempat dampak negatif yang dimiliki akan cepat

²⁵Frans Gromang, “*Tuntunan Keselamatan dan Keananan Wisatawan*”, (Jakarta: Prad Paramita, 2003), hal. 5

²⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, perencanaan pariwisata pendesaan (2012), h. 47

menjalar kedalam penduduk lokal sehingga sulit untuk di antisipasi.

Gamal Suwanto mengklasifikasikan mengenai pola kebijakan pengembangan pariwisata yang meliputi:

- a. Kebijakan umum
- b. Arah pola kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan
- c. Pola kebijakan pengembangan obyek wisata
- d. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana
- e. Kebijakan pengembangan kelembagaan
- f. Kebijakan pengembangan industri

Sedangkan terkait pariwisata yaitu sejak 6 Agustus 1969 dari awal pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden R.I No.9 Tahun 1969 dimana dalam BAB II pasal 3 disebutkan bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pariwisata, di antaranya:

- a. Wisatawan

Karakteristik wisatawan harus diketahui dari mana mereka datang.

Kunjungan wisata dipengaruhi oleh beberapa motif budaya, interpersonal, dan fisik.

- b. Transportasi

Salah satu faktor yang mempermudah wisatawan berpindah ke lokasi lain. Tentunya, transportasi yang disediakan harus memberikan kenyamanan dan keamanan.

c. Obyek Wisata

Obyek wisata merupakan salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Fasilitas Pelayanan, Fasilitas seperti hotel, restoran, telekomunikasi sebagai penunjang wisatawan. Informasi dan Promosi yang menarik dan informasi yang jelas akan menarik minat wisatawan.²⁷

Pengembangan suatu destinasi pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar objek destinasi wisata tersebut dapat diminati pengunjung yaitu:

- a. Something to see adalah objek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain objek wisata tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dayatarik dari wisatawan untuk berkunjung di objek tersebut.
- b. Something to do adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata disana bisa melakukan sesuatu yang berguna atau bermanfaat untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax, yang berupa fasilitas-fasilitas rekreasi baik itu arena

²⁷Oka A Yoeti, "*Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*", (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997) , h, 40

beraktivitas bermain-main ataupun tersedianya berbagai tempat makan, terutama makanan khas lokal, dari tempat tersebut sehingga mampu memberikan pengalaman baru serta membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal.

- c. Something to buy adalah fasilitas untuk wisatawan dapat berbelanja yang berupa souvenir, produk kemasan yang pada umumnya adalah merupakan ciri khas atau icon dari daerah tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.²⁸

4. Dampak Pariwisata Dalam Perekonomian

a. Pertukaran Valuta Asing

Pengeluaran sektor pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat lokal menggilat dan stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertmbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya.

b. Pendapatan pemerintah

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua yakni, kontribusi langsung dan tidak langsung kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi. Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan pemerintah berasal dari pajak atau

²⁸ Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, (yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan Stipram Yogyakarta), h. 59-60

bea cukai barang-barang yang diimport dan pajak yang diberikan kepada para wisatawan yang berkunjung.

c. Penyerapan tenaga kerja

Pada beberapa negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata terbukti bahwa sektor pariwisata secara internasional berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja²⁹, penciptaan usaha-usaha dari pariwisata meliputi:

1). Bisnis Biro Perjalanan

Bisnis biro perjalanan punya potensi besar. Pesatnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang melakukan perjalanan wisata menjadi berkah tersendiri bagi pelaku bisnis biro perjalanan. Setiap tahun tingkat kunjungan wisatawan diindonesia terus mengalami peningkatan yang sangat berarti.

2). Bisnis Kuliner

Semua orang butuh makanan, tidak terkecuali wisatawan, bisnis kuliner dikawasan destinasi/objek wisata tentu saja sangat menjanjikan. Kini bahkan telah berkembang pula wisata kuliner bisa dimaklumi karna kuliner nusantara memang sangat kaya.

3). Bisnis penyewaan kendaraan

Salah satu masalah dan kebutuhan wisatawan yang berlibur adalah transportasi. Tentu bisnis ini bisa memberikan kemudahan bagi

²⁹ I Gusti Bagus Rai Utama, Pemasaran Pariwisata, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2017), h. 11-13 .

wisatawan untuk berpindah dari tempat wisata yang satu ketempat yang lain.³⁰

4). Bisnis penginapan

Setiap wisatawan pasti membutuhkan tempat untuk beristirahat ketika berwisata. Bisnis penginapan tidak harus besar. Mungkin akan sulit membangun hotel mewah. Untuk itulah penginapan dengan harga terjangkau dan fasilitas sederhana juga banyak diminati.

d. Pembangunan infrastruktur

Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis semuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri sebagai tuan rumah.

e. Peningkatan perekonomian masyarakat

Pendapatan sektor pariwisata acap kali digunakan untuk mengukur ekonomi pada suatu kawasan wisata. WTO memprediksi bahwa pendapatan pariwisata secara tidak langsung disumbangkan 100% secara langsung dari pengeluaran wisatawan pada satu kawasan. Dalam kenyataannya masyarakat lokal lebih banyak berebut lahan penghidupan dari sektor informal ini, artinya jika sektor informal

³⁰ Bacruddin Saleh Laturiean, Strategi Bisnis Pariwisata, (Bandung : Humainiora, 2019), h. 87

tumbuh maka masyarakat lokal akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar.³¹

B. Pariwisata halal

1. Pengertian pariwisata halal

pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Menurut Duran dalam Akyol & Kilinc, pariwisata memiliki bermacam dampak sosial dan budaya. Wisata halal adalah suatu produk baru dari pasar muslim dan non-muslim. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyuarakan pada umatnya untuk melakukan perjalanan atau travelling hal ini bertujuan agar umatnya selalu senantiasa bersyukur atas kelimpahan rezeki di bumi. Di dalam Al-Qur'an ada sembilan (9) ayat yang membahas tentang perjalanan salah satunya terdapat pada surah Ar-Rum:42

³¹ *Ibid*, h. 14-15

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ

أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan (Allah).”(Q.S Ar-rum:42)

Sedangkan pariwisata halal/syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah tren baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-ankabut ayat ke -20 :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ لِنَفْسِهِ

الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuat (QS Al-Ankabut 20)”

Ayat diatas menunjukkan kepada manusia untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk meningkatkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup.

Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah jadi pariwisata halal tidak hanya terbatas dengan wisata religi saja.³²

2. Konsep pariwisata halal

Pariwisata halal mengacu pada penyediaan produk dan layanan kepariwisataan yang memnuhi kebutuhan pelacong muslim untuk memfasiitasi ibadah dan kebutuhan makanan yang sesuai dengan ajaran islam. Pariwisata halal merupakan jenis wisata yang manganut nilai-nilai islam, dan dalam perbandingan itu bisa dibuat dengan pertumbuhan islam. Bond and Hussain mengemukakan bahwa pariwisata halal merupakan subtipe dari wisata religi dimana jenis pariwisata ini dilakukan oleh para pengikut islam yang menjalani kehidupan berdasarkan pada hukum syariah. Sehingga sesuatu hal dapat digolongkan halal jika telah berpedoman pada kaidah islam.³³

Karakteristik Wisata halal:

³²Kurniawan Gilang Widagdyo, *Analisis pasar pariwisata Indonesia*, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015, h.2

³³ Ibid, h. 149.

- a. Destinasi yang aman dan ramah untuk aktivitas liburan keluarga terutama keluarga muslim.
- b. Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim terutama di kehalalan makanan, fasilitas sholat, fasilitas bandara, dan pilihan akomodasi.
- c. Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal seperti kemudahan berkomunikasi, kesadaran kebutuhan wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya, transportasi udara, dan persyaratan visa.

Panduan umum wisata syariah mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha penerbangan dan juga tempat perbelanjaan dan persinggahan.³⁴

Adapun beberapa panduannya yaitu:

- a. Destinasi wisata syariah meliputi, wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan, tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci, tersedia makanan dan minuman yang halal, pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah dan terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- b. Akomodasi yaitu tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.

³⁴ Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah, Karakter, Potensi Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014), h. 41

- c. Biro perjalanan wisata syariah yaitu menyelenggarakan paket perjalanan dan wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah, memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah, memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.
- d. Pramuwisata syariah yaitu memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, berakhlak baik komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab dan penampilan sopan menarik sesuai dengan etika islam.
- e. Penerbangan syariah yaitu menyediakan penerbangan ke sejumlah negara islam, memberikan makanan halal selama perjalanan, memberikan pelayanan maksimal dan ramah sesuai prinsip islam dan pramugari berpakaian sopan.
- f. Pusat perbelanjaan dan persinggahan yaitu menyediakan masjid ataupun mushola yang layak, lokasi masjid tidak berada ditempat lokasi yang tersembunyi dan menjaga kebersihan bangunan.

3. Manfaat Pariwisata Halal

Islam adalah agama *rahmatan lil alamain* nilai-nilai islam tidak hanya berlaku bagi umat islam saja tetapi bisa juga dirasakan manfaatnya bagi pemeluk agama lain. Oleh karena itu wisata syariah

atau wisata halal tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan muslim saja namun juga untuk umat agama lain bagi wisatawan muslim keberadaan wisata syariah dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Menambah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT karena dapat menjalankan perintah Nya dengan baik disegala tempat.
- b. Mentadabur ciptaan Allah SWT.
- c. Memberikan ketenangan dan kenyamanan.
- d. Memberikan kesenangan dan hiburan.
- e. Sebagai sarana dakwah Islam.

Bagi wisatawan non muslim keberadaan wisata syariah memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Jaminan kebersihan dan kesehatan.
- b. Ketenangan dan kenyamanan.
- c. Memberikan kesenangan dan hiburan.
- d. Memberikan citra positif agama islam sebagai agama *Rahmatan lil alamin*.³⁵

4. Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam

Secara sederhana ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup yang tak terbatas dengan cara mengelola sumber daya yang terbatas. Pengertian ini bertolak

³⁵ M. Amir Mahmud, Muhammad Endy Faidullah, Mimpri Wisata Syariah Studi Atas Peaksanaan Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi, (Banyuwangi : LPM Institut Agama Islam Ibrohimi Genteng Banyuwangi, Januari 2018). h. 11-12.

belakang dengan batasan menurut ekonomi islam yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas dengan cara mengelola sumber daya yang tak terbatas.

Islam memandang bagaimanapun kebutuhan manusia adalah terbatas dan terukur, sedangkan yang tidak terbatas adalah keinginan hawa nafsunya, maka berpotensi mencari harta sebanyak-banyaknya yang tidak mengenal batas, dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, norma, etika dan hukum yang sejatinya wajib dijunjung tinggi oleh siapapun.

Industri pariwisata halal yang pada dasarnya berpijak pada prinsip-prinsip syariah, para pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya, seyogyanya tidak terjebak kepada kepentingan yang justru kontarproduksi dengan misi suci yang tersirat dalam makna halal dalam arti luas.³⁶

Sebab itu mengelola destinasi wisata halal perspektif ekonomis islam dibagi kedalam beberapa bagian :

a. Relasi Pariwisata Halal dengan Nilai-nilai Rububiyyah (*uluhiyyah*)

Nilai-nilai tauhid atau ketuhanan (*rububiyyah-uluhiyyah*) dalam ekonomi islam pada dasarnya menjadi prima nilai-nilai karakter yang lain. Sebab itu posisi rububiyyah itu mendahului urutan posisi-posisi yang lain. Bahkan nilai rububiyyah itu merupakan kausa prima nilai-nilai turunan tersebut, artinya jika para pemangku turunan industri

³⁶ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidemensi Peta Jalan menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2017), h. 138-139.

imannya kokoh, niscaya mereka akan menghargai martabat wisatawan selaku manusia yang wajib dihormati dan dilayani secara maksimal mereka juga akan memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral dan seterusnya.³⁷

b. Pariwisata Halal Wahana Ukhuwah Universal (Insaniyah)

Wisata halal dalam sistematika ajaran islam masuk dalam ranah kajian muamalah yang mengatur interaksi antara manusia yang lain secara universal. Universal disini dimaksudkan bahwa dalam melakukan muamalah tidak dibatasi oleh isu SARA yang berpotensi bersifat eksklusif yang kurang menguntungkan secara bisnis.

Karena itu wisatawan dalam pariwisata halal, tidaklah dibatasi oleh faktor perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jika terjadi pembatasan, tentu saja kontraproduktif atau bertentangan dengan watak dasar ajaran islam yang rahmatan lil alamin bagi kehidupan di dunia. bukankah industri wisata halal merupakan ekspresi ajaran rahmatan lil alamin itu, sekaligus merupakan wahana melakukan silaturahmi antar manusia yang berada diberbagai aspek, sebab itu inilah arti penting keberadaan pariwisata halal mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan itu secara universal, antara lain dengan memberi pelayanan secara prima dan maksimal agar wisatawan merasakan kepuasan.

³⁷ *Ibid*, 141

Setiap individu (wisatawan) adalah bagian integral dari komunitas yang saling berintegrasi antara yang satu dengan yang lain. Sebab itu sebagai suatu kesatuan hubungan sosial, islam menjanjikan hak dan kewajiban perseorang secara berkeseimbangan,³⁸ sehingga dengan demikian, wisatawan akan merasakan aman, tenang dan nyaman dalam melakukan wisata.

c. Pariwisata Halal Butuh Panduan Nilai-nilai Etis (Ahlaqiyah)

Rosulullah saw menyatakan bahwa beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebab itu kita selaku umatnya wajib merefleksikan sifat terpuji beliau kedalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini diperkuat oleh yusuf Qardhawi yang secara tegas menyatakan bahwa segala aspek kehidupan ini tidak lepas dari nilai-nilai akhlak. Pada dasarnya pernyataan Qardhawi tersebut menerjemahkan ajaran Rosulullah saw diatas dalam ranah kehidupan. Oleh sebab itu mengimplementasikan nilai-nilai akhlak kedalam industri pariwisata halal adalah merupakan keniscayaan. Wujudnya, anatara lain berkaitan dengan masalah pelayanan dan masalah lain yang satupun aktivitas dalam wisata secara luas, artinya tidak ada satupun aktivitas dalam wisata halal yang bebas nilai, semuanya tetap dalam bingkai dan ajaran-ajaran akhlak .³⁹

³⁸ Mahmud Abu Saud, GBEI, Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 19.

³⁹ Muhammad Djakfar, Pariwisata Halal Perspektif Multidemensi Peta Jalan menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia, (Malang : UIN Maliki Press, 2017), h. 143-144.

d. Antara Korporat dan Konsumen Perlu Kesimbangan (wayatiyyah)

Destinasi pariwisata halal sebagai sebuah industri tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan (profit) secara materi sebagaimana bisnis pada umumnya. Tujuan seperti ini tentu saja sah-sah saja. Namun demikian, Islam mengajarkan hanya mendahulukan kepentingannya sendiri, tanpa peduli dengan kepentingan *stakeholder* yang harus di hargai dan dilindungi.

Jika korporat tertuju pada kepentingan sendiri, maka akan muncul praktek bisnis yang tidak fair, melanggar tatanan hukum dan etika yang sejatinya harus dijunjung tinggi. Sebab itu dewasa ini untuk mengendalikan ego sektora korporat pemerintah mewajibkan setiap perusahaan besar agar menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Itulah sejatinya sejalan dengan watak dasar ajaran ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan kesimbangan secara proporsional yang seyogyanya juga perlu diimplementasikan kedalam dunia pariwisata halal. Keseimbangan disini dimaksudkan bahwasanya dalam pariwisata yang berbasis syariah tidaklah cukup mengejar kepuasan lahiriyah semata bagi wisatawan dalam bentuk atraksi yang menarik namun juga perlu memperhatikan kepuasan dalam arti spritual seperti penyediaan tempat ibadah yang layak dan

representatif, tanpa terkecuali ketersediaan hotel dan restoran yang benar-benar syarii dan lain sebagainya.⁴⁰

e. Pariwisata Halal Antara Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab (Masuliyah)

Pada prinsipnya islam memberikan kebebasan kepada umat manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah dimuka bumi untuk melakukan usaha demi kelangsungan hidupnya. Hanya saja kebebasan itu tidak dalam arti sebebas-bebasnya yang tanpa batas. Karna bagaimanapun harus tetap dalam koridor ketentuan syariah sebagaimana yang telah diajarkan. Manusia bebas memilih bisnis apapun yang ditekuni, karna ini merupakan indikasi adanya kebebasan terbatas menurut ajaran islam. Katakan saja memilih bisnis industri pariwisata halal dengan pertimbangan karena saat ini merupakan bisnis yang banyak dikembangkan di berbagai negara dunia

Namun demikian perlu disadari bahwa bisnis yang menjadi pilihan itu tidaklah bebas nilai. Terlebih lagi dimaknai bebas dari pengawasan Allah swt sehingga dalam menjalankannya amanah itu para pemangku kepentingan pariwisata halal wajib mempertanggung jawabkan amanah yang dibebankan baik kepada konsumen wisatawan, terlebih lagi kelak dihadapan Allah swt.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, 145

⁴¹ *Ibid*, 146-147.

5. Pariwisata Halal Perspektif UU RI No.33

Perlu diakui bahwa produk yang beredar selama ini dimasyarakat belumlah semuanya terjamin kehalalannya secara syaria. Disamping pengatiran mengenai kehalalan suatu produk belum terjamin kepastian hukumnya sehingga perlu diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan secara nasional.

Itulah dasar pertimbangan yang menjadi alasan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam klausula menimbang. Oleh karena undang-undang ini bersifat umum, maka tentu saja berlaku pula untuk industri pariwisata halal yang harus steril dari segala hal yang haram berdasarkan syariah.

Adapun relevansi undang-undang tersebut dengan wisata halal, antara lain adalah karena menyentuh berbagai kebutuhan wisatawan (muslim) seperti tempat penginapan, restoran, kolam renang, spa dan faktor pendukung lain sebagainya. Selama di hotel, mereka dijamu makanan dan minuman sesuai fasilitas yang disediakan yang kesemuanya harus dijamin kehalalannya.⁴²

Demikian pula untuk restoran rumah makan dengan segala macamnya yang dijual kepada wisatawan selau konsumen harus jelas pula kehalalannya agar mereka tidak tercederai akidahnya karena telah menikmati produk yang haram untuk dikonsumsi.

⁴² *Ibid 149-151*

6. Pariwisata Halal Perspektif Fatwa DSN-MUI

Sebagai industri pariwisata yang berdasarkan prinsip syariah, tentu saja yang menjadi acuannya adalah ketentuan ajaran wahyu, yakni kitab suci-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Akan tetapi ketentuan dalam kitab suci tersebut masih bersifat *mujmal* (global) sehingga masih dibutuhkan penafsiran dan penjelasan yang benar dan dijamin kevaliditasannya. Adapun penjelasan yang utama apa yang datang dari Rasulullah saw, baik yang berupa perkataan (hadist), tindakan (sunnah), restu (taqrir), maupun yang tergambar dalam sifat-sifat beliau selama hayatnya.

Kendati demikian perlu dipahami, sejalan dengan perkembangan zaman, tidaklah sedikit muncul berbagai permasalahan baru yang kadangkala belum dikemukakan dasar ketentuannya dalam dua sumber pokok di atas. Sebab itu di sinilah arti penting kehadiran para ulama sebagai pewaris para Nabi untuk melakukan ijtihad agar segala persoalan baru yang timbul dapat segera ditemukan jalan keluarnya (solusi).

Karena itu mereka menjamin kepastian hukum dalam kaitannya dengan pariwisata halal yang berdasarkan prinsip syariah, di dalam rumusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 108/DSN-MUI/X/2016 pada dasarnya dapat dipetakan ke empat sumber, yakni al-Qur'an, Sunnah, (Hadist), Kaidah Fikih, dan pendapat para ulama. Sumber pertama dan kedua merupakan

wahyu sedangkan yang ketiga dan keempat merupakan produk pemikiran (ijtihad-rumusan) para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariat.

Tidak sedikit pijakan syar'ii tentang pariwisata yang telah dieksploitasi oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa tersebut yang digali langsung dari al-Qur'an. Antara lain sebagaimana yang tertuang di dalam QS., Al-Mulk, 67:15, QS, Nuh, 71:19-20.QS, Al-Rum, 30:9, QS Al-Ankabut, 29:20 dan QS, Al-Jumuah, 62:10.⁴³

C. Perekonomian Daerah

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Ada tiga macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. pertumbuhan output digunakan untuk menilai kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi.⁴⁴

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

⁴³ Ibid, 172

⁴⁴ Rasyid Widada, Dedi Budiman Hakim, Sri Mulatsih, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota hasil pemekaran di Indonesia", jurnal manajemen pembangunan daerah, vol 6 no 2, Oktober 2014, h.6.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan besaran yang mencerminkan perekonomian daerah besaran ini bisa dipandang dari sisi penyediaan, PDRB merupakan total nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi menghasilkan barang dan jasa disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Data tersebut dikategorikan disajikan menurut lapangan usaha dan dimanfaatkan untuk mengukur tingkat perekonomian dan struktur ekonomi suatu wilayah serta pendapatan perkapita penduduk. Indikator ini memberikan gambaran mengenai potensi sekaligus kemampuan wilayah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang dapat dipungut sendiri dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah bersangkutan. Komponen PAD tersebut mencakup unsur Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan lain yang sah. Termasuk dalam pajak ini adalah pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lainnya yang dipungut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Tetapi retribusi daerah hanya dapat dipungut bilamana daerah memberikan jasa pelayanan tertentu kepada masyarakat.⁴⁵ Besar kecilnya PAD yang diterima oleh

⁴⁵ *Ibid*, 273-275

suatu kota akan sangat ditentukan oleh dua hal yaitu potensi penerimaan daya tarif pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) setempat. Potensi PAD sangat ditentukan dengan perkembangan jumlah, ukuran dan kualitas objek pajak bersangkutan. Sedangkan tarif pajak oleh pemerintah daerah setempat dengan memerlukan perkembangan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan wajib pajak yang terdapat pada kota yang bersangkutan. Memerhatikan jenis pajak yang merupakan sumber utama penerimaan PAD tersebut, terlihat disini bahwa besar kecilnya penerimaan PAD akan sangat ditentukan oleh perkembangan kegiatan perekonomian daerah bersangkutan.

Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No 10.28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi antara badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

⁴⁶ Yani, Ahmad, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 52-53

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain:

- a. Banyaknya sumber pendapatan di Kabupaten/Kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah.
- c. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
- d. Adanya kebocoran-kebocoran.
- e. Biaya pungut yang masih tinggi.⁴⁷

D. Kajian Pustaka

Peneliti menemukan beberapa jurnal yang pernah ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi, setelah penulis membaca beberapa jurnal tersebut ada perbedaan pembahasan yang cukup signifikan, sehingga dalam penulisan skripsi ini nantinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu dibawah ini akan penulis kemukakan skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, diantaranya sebagai berikut:

Dedi Rosadi, 2011, Dalam jurnalnya dengan judul “Pengelolaan Pariwisata Religi Dalam Memberikan Pelayanan Ziarah Pada Jama’ah

⁴⁷ Carunia Mulya Firdausy, Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Kedua, Maret 2018) h. 27

(Studi Kasus Fungsi Pengorganisasian Pada Majelis Ta'lim Al -Islami KH. Abdul Kholiq di Pegandon Kendal Tahun 2008 - 2010)", penelitian ini membahas tentang implementasi pengorganisasian dalam pengelolaan pariwisata religi dalam melayani kepada jama'ah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi pengorganisasian pariwisata religi di majelis ta'lim Al-Islami Pegandon Kendal secara garis besar sudah cukup baik, namun masih ada kekurangannya yaitu dalam bidang teknologi.

Hariyanto, 2008, Dalam tesisnya dengan judul "Pengembangan Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata (ODTW) Keagamaan (Studi Kasus Pengelolaan Dakwah Melalui Kegiatan Pariwisata Ziarah Masjid Agung Demak)". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan manajemen dakwah, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian pengembangan dakwah melalui Pariwisata Ziarah Masjid Agung Demak telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat, baik dari aspek planning, organizing, actuating maupun controlling. Dari aspek planning, bahwa perencanaan dakwah di Masjid Agung Demak telah dikelola secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Masjid Agung Demak telah dengan baik membuat perencanaan dalam pengembangan dakwah. Kegiatan-kegiatan dakwah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan agar tercapai dengan efektif dan efisien telah direalisasikan sebagaimana petunjuk manajemen.

Demikian pula bila memperhatikan sistem pengorganisasian dakwah yang dikembangkan para pengurus Masjid Agung Demak maka berdasarkan data dapatlah dikatakan bahwa pengorganisasian dakwah telah berhasil yang ditandai dengan pembagian tugas dan wewenang, serta penempatannya sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya masing-masing. Ditinjau dari aspek pergerakan dakwah bahwa masalah inipun telah berhasil dengan baik.

Alwafi Ridho Subarkah, 2018, Dalam jurnalnya yang berjudul “potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah studi kasus pada Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini membahas tentang pariwisata halal sebagai instrument diplomasi public Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi daerah, karna potensi wisata halal diharapkan dapat memiliki pengaruh terhadap perekonomian daerah terutama bagi provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konsep diplomasi public dan konsep pariwisata halal. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil diplomasi public Indonesia dengan menampilkan diri sebagai destinasi wisata halal dianggap berhasil dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara terutama wisatawan muslim dan menarik investasi, serta perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif, sehingga dengan meningkatnya kunjungan wisata dan investasi dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan perekonomian daerah seperti Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal.

Sudirman Suparmin dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatra Utara”, Jenis penelitian ini digunakan penelitian survey untuk studi ini. Analisis data dalam studi ini adalah analisis secara kualitatif secara umum dan analisis kerja keras. Analisis secara kualitatif umumnya ditujukan pada data dari hasil diskusi, pengamatan dan wawancara oleh mengumpulkan dan menganalisis data secara bersamaan, menulis catatan selama dan setelah pengumpulan data, pengkodean untuk menyederhanakan data, menulis penalaran data, dan pengembangan konsep dan koneksi hasil analisis dengan literatur yang ada. Hasil penelitian untuk kota Medan sudah siap sebagai tujuan wisata Syariah untuk aspek atraksi (karena mereka telah mulai untuk menyimpan paket wisata Syariah dan acara), kenyamanan (kecuali Hotel dan spa yang sebagian tidak memiliki sertifikasi halal) dan lembaga. Optimasi kota Medan sebagai tujuan wisata Syariah memerlukan beberapa perbaikan, terutama dalam aspek kelembagaan, terutama kesiapan SDM. Dan jelas peraturan dari pemerintah kota Medan, untuk kota Parapat belum optimal untuk bekerja pada pariwisata Halal. Tapi masih perlu komitmen dan konsistensi dalam mengerjakan Halal pariwisata di kota Parapat.

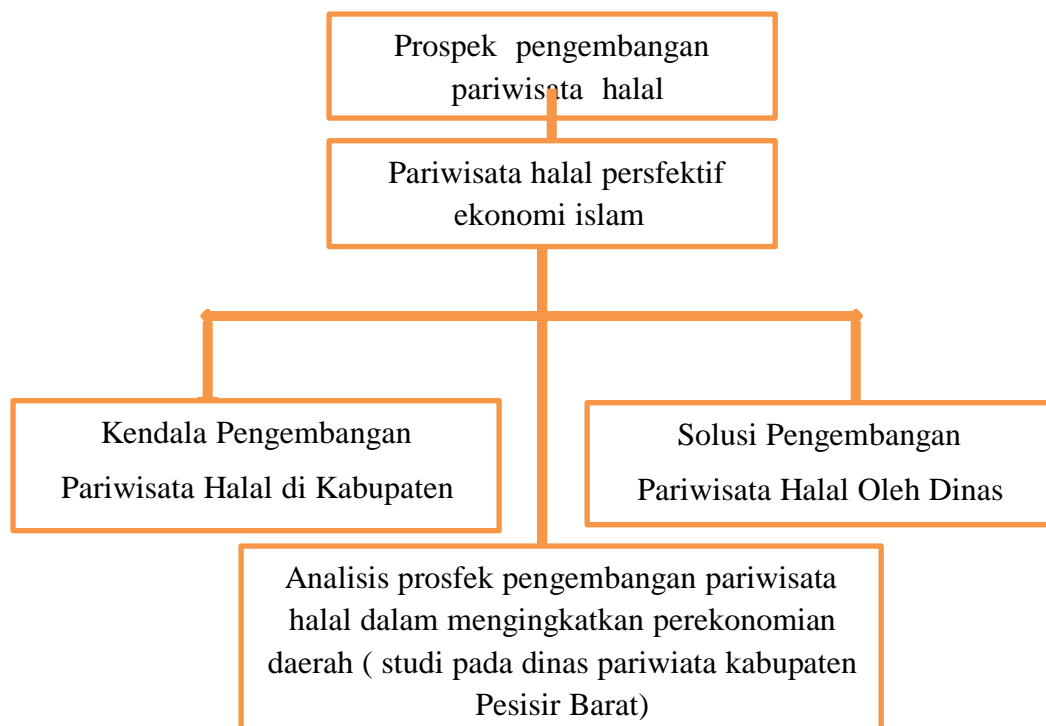
Alvien Septian Haerisma dalam jurnalnya yang berjudul “Pengembangan Pariwisata Halal di Indobesia tinjauan Etika Bisnis Islam” penelitian ini membahas tentang : Industri halal menjadi tren global dan

peluang bisnis diberbagai negara. Industri halal membawa kemanfaatan bagi perekonomian Indonesia dilihat dari sisi produk. Ruang lingkup industri halal di tengah perekonomian global saat ini mencakup beberapa aspek, diantaranya: Industri pelayanan keuangan, industri makanan dan minuman, industri farmasi dan obat-obatan, industri kecantikan kosmetik, industri rumah sakit dan pariwisata, dan industri fashion dan lifestyles. Pasar pariwisata halal menjadi masa depan sumber ekonomi suatu bangsa. Permintaan pariwisata halal dunia menunjukkan pertumbuhan positif sehingga seluruh negara belahan dunia harus menyiapkan infrastrukturnya dan menjadi peluang bisnis sebagai devisa negara tersebut. Aktivitas ekonomi sudah saatnya untuk memasukkan nilai-nilai etik diberbagai cabang bisnis. Terdapat lima aksioma kunci mengatur etika bisnis Islami didalamnya terdiri: kesatuan (unity), keseimbangan dan kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free will), dan tanggungjawab (responsibility) dan kebajikan (benevolence). Etika bisnis Islam dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah, pengusaha atau pengelola pariwisata atau juga masyarakat luas sebagai konsumen dan stakeholder lainnya

E. KERANGKA PIKIR

Supaya memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai Analisis Model Pengembangan Pariwisata Halal Dalam meningkatkan Perekonomian Daerah perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat) maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai panduan sehingga penelitian ini dapat tercapai dengan baik.

Pariwisata halal merupakan suatu trend baru saat ini dalam mendukung pendapatan suatu daerah, maka dari itu kerangka pikir dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Abu dan Narbuko Cholid, *metodologi penelitian*, cet 12, Jakarta: Bumi aksara, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta,: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Amerta Suniasta Made I, *Pengembangan Pariwisata Alternatif*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2019
- Andayani Fitria dan Sucipto Hery, *Wisata Syariah, Karakter, Potensi Prospek dan Tantangannya*, Jakarta: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014.
- A.j Muljadi, *Kepariwisata dan perjalanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Cayaray Sarliaji : *Model Layanan Perpustakaan Daerah luar biasa*, Reposi. Upi Edu Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.
- Djakfar Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidemensi Peta Jalan menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, Malang : UIN Maliki Press, 2017.
- Eko Nugroho, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Faidullah Endy Muhammad, Mahmud Amir M, *Mimpi Wisata Syariah Studi Atas Peaksanaan Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi*, Banyuwangi : LPM Institut Agama Islam Ibrohim Genteng Banyuwangi, Januari 2018
- Gromang Frans, : *Tuntunan Keselamatan dan Keananan Wisatawan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- G Putu dan Pitana Gde I. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta, ANDI, 2007.
- Hadiwijoyo Sakti Suryo, *perencanaan pariwisata pendesaan*, 2012.
- Hartono, *Bimbingan Karier*, Kencana, 2018.
- I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, Yogyakarta : Deepublish, Agustus 2014.

Isdarmanto, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan Stipram, 2017

James j. Spillane, *ekonomi pariwisata sejarah dan prospeknya*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Kartono Kartini, *pengantar metodologi riset sosial*, Bandung, Mundur Maju.

Majid Abdul, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet ke IV, Jakarta: Rhineka Cipta, 2004.

Muani, *Kebudayaan dan Pariwisata*, Yogyakarta : Garudhawaca, 2018.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Qhardawi Yusuf, *Fiquh Zakah Muarsasat Ar-risalah*, Bairut Libanan, Cet II 1408H/1998 terjemahan Didin Hafifudin.

Rendayani Mentari, *Analysis Potential and Strategy Development of Puncak Mas Sukadanaham bandar lampung*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018

Roman Arif : *Peran Kelompok Sadar Wisata Terhadap Perkembangan Pariwisata Pantai Baron dan Pindul*, Skripsi, Yogyakarta, Sosial dan Humanior Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Saud Abu Mahmud, GBEI, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 19.

Sofyan Riyanto : *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sugiono : *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Cet ke 26, Bandung, Alfabeta CV, 2017.

Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Spillane J. James, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prosepeknya*, Yogyakarta: Kansius, 2001

Supriadi Dedi, Wibowo Sukarno, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.

Suprayitno Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Sutrisno Hadi , *Metode Research*, UGM, Yogyakarta 2002.

Tika, Pabundu Moh *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Thiptoherijanto Prijono, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat.

Wardana: *potensi dan strategi perkembangan pariwisata kabupaten pesisir barat, Lampung*, fakultas ilmu sosial dan politik universitas lampung, 2017.

Yoeti, A Oka, *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata* Jakarta, Pradnya Paramitha, 1997.

Yunus Mahmud , *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

Yusuf Husni : *Pemetaan Objek Wisata Alam Kabupaten Pesisir Barat* Tahun 2015, September 2019.

Jurnal

Anicha Aisyah, *Peran Strategi Dinas Pariwisata dan Biro Perjalanan Wisata dalam mengoptimalkan pariwisata halal di Kota Solo*, Skripsi program S1 ekonomi IAIN Surakarta, Surakarta, 2017

Al Et Chookaew : *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country*.

Arifin Johssar : *Wawasan Al-qur'an dan Sunnah Tentang pariwisata*, dalam Jurnal An Nur Nomor 2, Vol. 4, 2015.

Nanda Rahmi, *kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh*, jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, Vol 8, No.01, Januari 2017.

Resi Marlia Sari, *Analisis Prospek Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Ditinjau dari Perspektif*

Ekonomi Islam (Studi Pada Vila Gardenia Desa Suka Jaya Kabupaten Pesawaran), Skripsi Program S1 Sarjana Ekonomi Universitas Islam Negeri Lampung, 2019

Suparmin Sudarmin, *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatra Utara*, Tansiq, Vol. 1, No. 2, 2018.

Surya D, *Provinsi di Indonesia*, CreateSpace Independent Publishing Platferm, 2012.

Utama Rai Bagus Gusti I, *Pemasaran Pariwisata*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2017.